

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kanada mulai mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia melalui Colombo Plan selama 1950-an. Selama tiga puluh tahun antara 1967 dan 2007, Kanada memberikan bantuan kepada Indonesia dalam pengaturan koordinasi internasional yang didirikan di bawah Kelompok Antar-Pemerintah untuk Indonesia dan Kelompok Konsultatif untuk Indonesia. Sebagai mitra pembangunan, Kanada bekerja erat dengan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan. *Canadian International Development Agency* (CIDA) mengelola program bilateral Kanada untuk bantuan pembangunan ke Indonesia hingga dimasukkan dalam urusan Global Affairs Canada. CIDA menjadikan Indonesia sebagai "negara konsentrasi" utama bagi kerja sama pembangunan Kanada, dengan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai penerima bantuan Kanada pada 1980-an.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia menunjukkan investasi Kanada di Indonesia untuk periode 2005 hingga 2011 terdiri dari 37 proyek senilai US \$ 157 juta. Jumlah terbesar proyek investasi Kanada ada di pulau Jawa, tetapi nilai investasi dolar terbesar terletak di Sulawesi. Pada mulanya proyek investasi yang dilakukan oleh Kanada di Indonesia samata-mata untuk meningkatkan perekonomian kedua Negara, namun seiring berjalannya waktu Kanada mulai memasukkan nilai-nilai yang mereka miliki dalam setiap bantuan atau kerjasama yang mereka

buat. Salah satunya yakni memasukkan aspek gender. (Embassy of The Republic of Indonesia, 2018)

Hubungan kerjasama antara Kanada dan Indonesia telah dimulai sejak lama dan keduanya memiliki hubungan yang baik selama ini. Kanada telah menetapkan tujuan nasional untuk menargetkan mitra dagang baru dan tujuan ekspor. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berkembang fokus pada pertumbuhan ekonomi. Berinvestasi dan mendapatkan manfaat dari melakukan bisnis di Indonesia, Kanada perlu fokus pada apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi dan melakukan bisnis. Indonesia sebagai negara berkembang memberikan peluang besar di masa depan bagi warga Kanada untuk berpartisipasi, menyediakan, dan memenuhi kebutuhan ekonomi Indonesia yang sedang berkembang. Salah satunya yakni dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Kanada kepada Indonesia. (Embassy of the Republic of Indonesia, 2012)

Kerjasama perdagangan dan investasi antara Kanada dan Indonesia pada mulanya tidak terlalu berfokus pada aspek gender meskipun telah memasukan ide-ide tersebut. Ide untuk memasukkan aspek gender pada awalnya sudah mulai terlihat pada proyek yang dilakukan oleh Kanada yakni *Canadian Market Access and Trade Capacity Building*. Proyek tersebut berjalan pada tahun 2009 sampai 2013 yang dilakukan bersama lima negara lain yakni Indonesia, Ekuador, Guyana, Burkina-Faso, dan Haiti. Dalam proyek tersebut salah satu *policy maker* yang terlibat yaitu mengenai *gender equality*. Meskipun telah memasukkan ide

tersebut, namun proyek ini tidak berfokus langsung hanya kepada perempuan saja, tapi secara umum. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan layanan dukungan perdagangan yang tersedia untuk eksportir usaha kecil dan menengah (UKM) di negara-negara ini serta untuk membangun kapasitas UKM terpilih untuk meningkatkan daya saing perdagangan mereka dan membangun kontak yang memungkinkan peningkatan ekspor dan pertumbuhan lapangan kerja. Dari adanya proyek tersebut salah satu hasilnya menunjukkan bahwa hasil dari pengembangan kapasitas perdagangan dan layanan tautan yang disediakan untuk lima negara mitra, menunjukkan bahwa 39% perusahaan kecil atau menengah dipimpin oleh perempuan telah meningkatkan penjualan atau meningkatkan kapasitas untuk terlibat dalam perdagangan. (UNIDO, 2013)

Globalisasi ekonomi adalah proses yang cenderung menuju reformasi kebijakan ekonomi neoliberal (seperti deregulasi dan privatisasi) dan peningkatan modal, barang, jasa, dan pergerakan tenaga kerja. Teori perdagangan menunjukkan bahwa perdagangan internasional yang berkembang harus menguntungkan perempuan, terutama di negara-negara berkembang. Menurut perspektif alternatif dan dalam mencoba mengembangkan debat konstruktif tentang dampak globalisasi terhadap perempuan, serangkaian praktik harus dideteksi, dianalisis, dan dipromosikan untuk meminimalkan dampak negatif globalisasi terhadap perempuan dan memperkuat yang positif. (Apellániz, Núñez, & Charlo-Molina, 2012)

Memasuki era globalisasi, peranan perempuan bukan hanya sebagai pendamping pria atau hanya mengurus rumahtangga. Kaum perempuan pada era globalisasi ini juga harus bersosialisasi dengan masyarakat dan mengembangkan karirnya. Permasalahan yang sering dihadapi oleh perempuan yang tidak dapat dipisahkan yakni ideologi, struktur dan budaya. Ketiga hal tersebut berkaitan dalam hal mengukuhkan suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan. (Djelantik, 2009) Perlakuan tidak adil terhadap perempuan juga terjadi yang berdampak pada hak perempuan. Contoh-contoh isu gender yang ada menjadi pertimbangan bahwa gender benar-benar menjadi perhatian global.

Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA) merupakan sebuah proyek yang dilakukan oleh Kanada dan Indonesia melalui Global Affairs Canada bersama Kementerian Perdagangan RI. Program bantuan pembangunan yang dilakukan oleh Kanada kepada Indonesia ini mengalokasikan dana senilai C\$12,550,000.00 dengan jenis keuangan berupa hibah bantuan tidak termasuk reorganisasi hutang. Jenis bantuan pembangunan ini yakni intervensi tipe proyek. Bantuan ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia, dengan fokus pada yang dimiliki dan dioperasikan oleh perempuan. Proyek bantuan ini selain bekerjasama dengan pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan berbagai kalangan seperti organisasi sektor swasta, dan pakar kebijakan perdagangan untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh pelaku UKM. Proyek ini juga menyediakan layanan konsultasi yang ditargetkan untuk mengembangkan peluang komersial bagi UKM Indonesia yang

menjanjikan. Ini mempromosikan peluang investasi Kanada di Indonesia melalui riset pasar dan pertukaran antara komunitas bisnis Kanada dan Indonesia. Hasil yang diharapkan untuk proyek ini meliputi: (1) peningkatan peluang perdagangan dan investasi yang berkelanjutan dan responsif gender, khususnya untuk usaha kecil dan menengah (UKM), antara Indonesia dan Kanada; dan (2) meningkatnya penggunaan analisis perdagangan dan investasi dan reformasi peraturan oleh para pemangku kepentingan Indonesia untuk memperluas kemitraan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kanada. (Canada, 2019)

Gender Mainstreaming (Pengarutamaan Gender) adalah strategi yang diterima secara global untuk mempromosikan kesetaraan gender. Pengarusutamaan bukanlah tujuan itu sendiri tetapi strategi, pendekatan, sarana untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Pengarusutamaan melibatkan memastikan bahwa perspektif dan perhatian gender terhadap tujuan kesetaraan gender adalah penting untuk semua kegiatan - pengembangan kebijakan, penelitian, advokasi / dialog, perundang-undangan, alokasi sumber daya, dan perencanaan, implementasi dan pemantauan program dan proyek. (United Nations). Pengarusutamaan gender memerlukan tiga komitmen praktis utama: Integrasi kesetaraan gender dalam intervensi secara umum, menargetkan kelompok atau isu spesifik melalui intervensi khusus, dialog dengan mitra tentang isu dan aspek peka gender. (Brown, Huckerby, & Shepher, 2019)

Program proyek bantuan responsive gender dalam bantuan ini yakni diantaranya seperti: (1) TPSA bersama Angel Investment Network Indonesia (ANGIN) mengadakan lokakarya

pelatihan pemasaran digital dan akses modal untuk UKM yang dipimpin perempuan; (2) proyek TPSA menyelenggarakan lokakarya tentang kepekaan gender dalam analisis rantai nilai; (3) TPSA dan Fairtrade mendukung forum perempuan dalam kopersiserta mengadakan lokakarya pelatihan untuk pelatih tentang kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan. (TPSA) Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari tesis ini dibuat untuk menjelaskan faktor di balik Kanada memasukkan aspek gender pada bantuan pembangunannya ke Indonesia sebagai periode 2014-2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, tesis ini akan fokus pada menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: "Mengapa Kanada memasukkan aspek gender dalam *Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance* tahun 2014-2019 ?"

C. Kerangka Berpikir

Berkenaan dengan tesis, peneliti telah memilih konsep dan teori untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan:

1. Konsep *Feminist Foreign Policy*

Kebijakan Luar Negeri Feminis adalah kebijakan suatu negara yang mendefinisikan interaksinya dengan negara-negara lain dan gerakan-gerakan dengan cara yang mengutamakan kesetaraan gender dan mengabadikan hak asasi perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara tradisional lainnya, mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mencapai visi itu, dan mencari melalui

implementasinya untuk mengubah struktur kekuasaan yang didominasi kaum lelaki dan lelaki di semua pengungkit pengaruhnya (bantuan, perdagangan, pertahanan dan diplomasi), yang diinformasikan oleh suara-suara aktivis, kelompok, dan gerakan feminis. (Thompson & Clement , 2019)

Kebijakan luar negeri feminis tidak terbatas pada satu tuas tunggal hubungan internasional— "diplomasi feminis" atau "bantuan internasional feminis" atau sejenisnya, juga, tentu saja, bukanlah program bantuan atau inisiatif tunggal yang merupakan kebijakan luar negeri feminis. Sebaliknya, bagi kita kebijakan luar negeri feminis adalah pendekatan yang lengkap, konsisten, dan koheren terhadap suatu badan kerja yang mencakup semua dukungan kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Jika dilakukan dengan benar, pendekatan tersebut akan mencakup bantuan, perdagangan dan pertahanan, di samping diplomasi, menggunakan semua alat dalam kotak alat kebijakan luar negeri untuk memajukan dunia yang lebih adil. Dan yang paling penting, ini akan diinformasikan oleh dan memperkuat suara para pemegang hak yang ingin dirayakan dan didukungnya.

Kebijakan luar negeri feminis memiliki dua tujuan kebijakan utama, menurut Jolynn Shoemaker dan Sahana Dharmapuri: kesetaraan gender (peningkatan peluang bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan) dan sensitivitas gender (memeriksa dampak kebijakan luar negeri dalam hal melanggengkan atau mengurangi ketidaksetaraan gender). Kebijakan luar negeri feminis adalah kebijakan yang “memprioritaskan implementasi penuh komitmen internasional dan nasional untuk

memajukan hak asasi manusia — yang mencakup kesetaraan gender” (Shoemaker & Dharmapuri, 2016). Kebijakan luar negeri semacam itu melibatkan masyarakat sipil, yaitu aktivis perempuan, serta kebijakan yang menawarkan peluang dalam posisi kepemimpinan bagi laki-laki yang mendukung dan mempromosikan kesetaraan gender (Shoemaker & Dharmapuri, 2016).

Pada Juni 2018, ketika Kanada meluncurkan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) pertama di dunia. Mengabaikan menyertakan ranah kebijakan luar negeri yang lebih luas untuk diplomasi, pertahanan, dan perdagangan, FIAP menguraikan pemikiran Kanada tentang seperti apa pendekatan feminis terhadap pembangunan nantinya. Kebijakan itu menyatakan dirinya dalam komitmen terhadap hak, dan melakukan peluncurannya dengan proposal anggaran yang menempatkan sumber daya baru di atas meja untuk ODA, lulus uji “sumber daya” dengan membawa tingkat bantuan keseluruhan naik dari 50 tahun. rendah — walaupun tidak banyak — dan merangkul tolok ukur 95% dari pengeluaran anggaran bantuan luar negerinya untuk kesetaraan gender sebagai tujuan primer atau sekunder, (sebagaimana dilacak oleh data OECD). Ini merupakan kenaikan signifikan dari hanya 2,4% dari 2015-2016 dan 6,5% dari 2016-2017 pada penanda gender 2, dan 68% dan 75% pada gender sekunder untuk tahun yang sama. (Thompson & Clement, 2019)

Perdana Menteri Trudeau, seorang feminis yang memproklamirkan diri, telah memodelkan perwakilan dengan menunjuk seorang menteri luar negeri perempuan, seorang menteri pembangunan perempuan dan kabinet paling beragam dalam

sejarah Kanada. Kebijakan Kanada tidak, bagaimanapun, berjanji untuk "menggangu" struktur kekuasaan patriarki dalam bantuannya, seperti yang dilakukan Swedia, meskipun itu memasukkan partisipasi politik perempuan sebagai bidang prioritas tematis. Untuk sebagian besar, pendekatan Kanada memprioritaskan kesetaraan gender sebagai prioritas utama dalam melayani tujuan ekonomi dan keamanan yang lebih luas. Menurut Pemerintah Kanada, kebijakan mereka "berupaya memberantas kemiskinan dan membangun dunia yang lebih damai, lebih inklusif, dan lebih sejahtera. Kanada sangat percaya bahwa mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan adalah pendekatan yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini". Salah satu program bantuannya yakni Canada Indonesia Trade and Private Sector Assistance.

2. Teori Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Decision Making Process*)

Hal pertama yang perlu diketahui untuk menjawab pokok permasalahan dan menganalisis menggunakan teori proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, penting untuk memahami konsep dasar kebijakan luar negeri. George Modelski, mendefinisikannya sebagai "*sistem kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat untuk mengubah perilaku negara lain dan untuk menyesuaikan kegiatan mereka sendiri dengan lingkungan internasional. Kebijakan luar negeri harus menyoroti cara negara berusaha untuk berubah, dan berhasil mengubah perilaku negara lain*" Modelski, hanya mencatat aspek-aspek kebijakan yang mengarah pada perubahan perilaku

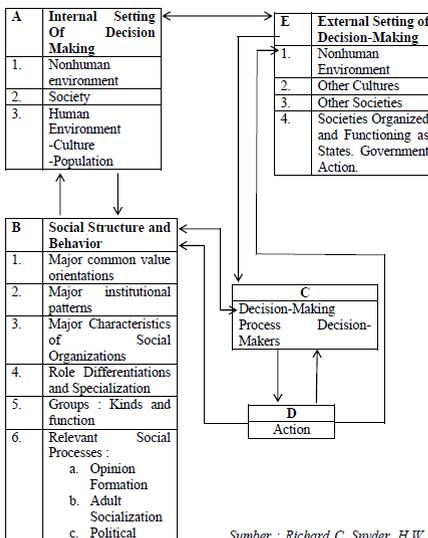
negara yang ada, sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri. Namun, kebijakan luar negeri tidak hanya berubah, tetapi juga kelanjutan dari perilaku pada waktu yang berbeda. (Neack, 2008) Kebijakan luar negeri telah didefinisikan dalam berbagai cara oleh para sarjana. Namun, mereka yakin bahwa itu berkaitan dengan perilaku negara terhadap negara lain. Charless Hermann mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai “tindakan sengaja yang berbeda yang dihasilkan dari keputusan tingkat politik individu atau kelompok individu. Hal ini dapat diamati dari keputusan tingkat politik. Ini bukan keputusan, tetapi produk dari keputusan.” Dengan ini, dapat dilihat bahwa Hermann mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai perilaku negara. (AS, 2018). Karena kebijakan luar negeri secara umum adalah tentang interaksi suatu negara dengan negara lain, interaksi ini hanya terjadi di tingkat 'internasional' dan karenanya, tidak dapat diabaikan dalam menganalisis kebijakan luar negeri negara mana pun.

Kebijakan luar negeri setiap negara dipengaruhi oleh dua faktor penentu; ‘Internasional’ / eksternal dan ‘domestik’ / internal. Ini dianggap sebagai faktor yang membantu dalam membentuk dan membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam kasus Kanada yang memasukkan aspek gender pada *Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance*, harus ada faktor internal yang mempengaruhi Kanada di final untuk mengambil keputusan. Di sisi lain, proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dalam bentuk bantuan kepada Indonesia harus dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti internal dan eksternal. Untuk menganalisisnya, Richard C. Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin telah menjelaskan secara khusus proses di belakang negara memutuskan

untuk membuat kebijakan luar negeri dengan menggunakan perspektif faktor internal dan eksternal.

Faktor eksternal merupakan faktor atau kondisi yang berada di luar batas teritorial negara - tindakan dan reaksi negara lain (pembuat keputusan mereka) dan masyarakat tempat tindakan dan dunia fisik berlangsung. Perlu dicatat bahwa faktor ini tidak mengecualikan apa yang disebut keterbatasan lingkungan seperti keadaan teknologi, rasio morbiditas dan sebagainya. Pengaturan eksternal terus berubah dan akan terdiri dari apa yang para pembuat keputusan memutuskan adalah penting. Biasanya faktor dan kondisi yang disebut dengan istilah faktor internal secara longgar diberi label "politik dalam negeri," "opini publik" atau "posisi geografis". Pengertian yang agak lebih memadai yakni beberapa petunjuk tentang cara negara berperilaku terhadap dunia harus dicari dalam cara masyarakatnya diatur dan berfungsi, dalam karakter dan perilaku rakyatnya dan di tempat tinggal

Gambar 1. 1 Model Proses Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri Richard Snyder



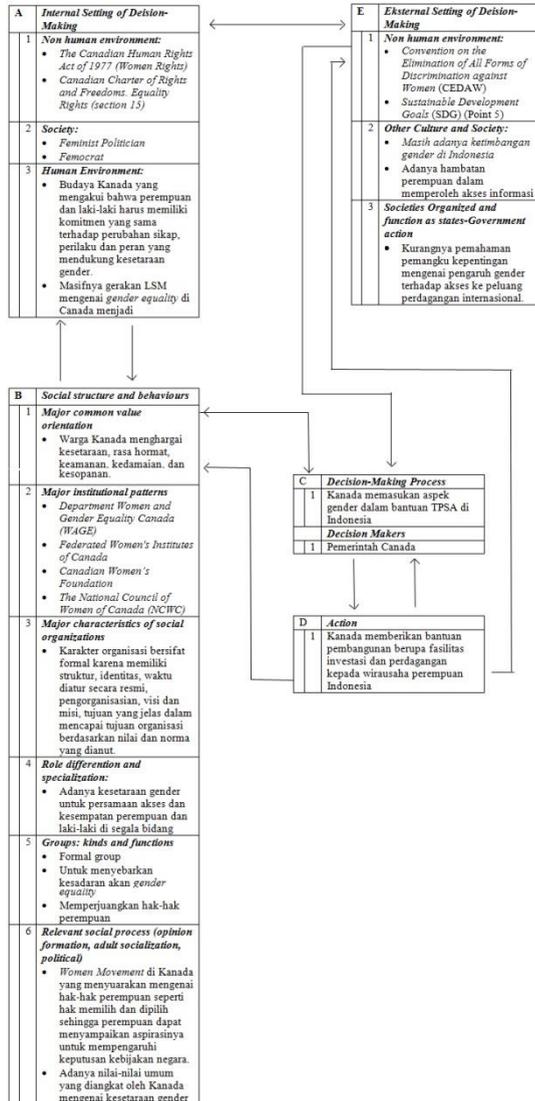
Sumber : Richard C. Snyder, H.W.

Bruck, Burton Sapin, 1962, *Foreign Policy Decision-Making, An Approach to the study of International Politics*, The Free Press of Glencoe

fisiknya. (Snyder, Sapin, & Bruck, 2002)

Untuk menerapkan teori dalam tesis ini, diagram di bawah ini akan menjelaskan aplikasi berdasarkan kasus:

Gambar 1.2 Aplikasi *Decision-Making Process*



Kanada memasukkan aspek gender dalam bantuan *Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance 2014-2019* dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal dalam proses pengambilannya. Seperti yang ditunjukkan dalam diagram di atas, faktor internal yang mempengaruhi keputusan tersebut yakni adanya *feminist politicians* didalamnya. Semenjak pergantian presiden Kanada dipimpin oleh Justin Trudeau, Kanada dikenal dengan pemerintahannya yang feminis. Dalam pemerintahannya saat ini, kabinetnya dirancang dengan jumlah perempuan dan laki-laki yang sama untuk mempertegas mengenai kepercayaan feminisnya. Selain itu, Chrystia Freeland selaku menteri perempuan yang menjabat sebagai menteri luar negeri Kanada, mengatakan bahwa akan mengejar kebijakan feminis di dalam dan luar negeri untuk mencerminkan negara yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. *Canadian Charter of Rights and Freedoms* dan *Canadian Human Rights Act* menguraikan kewajiban hukum untuk memastikan kesetaraan gender di Kanada. Setiap kebijakan dan kegiatan memiliki perspektif atau implikasi gender. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pemerintah Kanada untuk melakukan perubahan dan perbaikan mengenai kesetaraan gender baik untuk dalam maupun luar negeri. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari landasan konstitusional Kanada dan menganggap hal tersebut merupakan kebutuhan Kanada. Terkait dengan masalah ini, Kanada dibawah Justin Trudeau menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Kanada tahu bahwa memberdayakan perempuan, di luar negeri dan didalam negeri, membuat keluarga dan negara lebih sejahtera. (Government of Canada, 2017)

Struktur dan perilaku sosial sebenarnya menjadi bagian dari pengaturan internal. Berdasarkan diagram di atas, pengaruh pengaturan internal pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri Kanada berasal dari perilaku atau struktur sosial. Hal ini bermula dengan adanya *women's movements* yang terjadi di Kanada. Sejak akhir tahun 1800-an gerakan perempuan ini semakin gencar menyuarakan hak-hak perempuan di area public. Hingga April 1940 untuk hak mereka untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya gelombang kedua selama periode 1960-85 - sering disebut sebagai feminisme gelombang kedua - termasuk kampanye untuk mendukung perdamaian dan pelucutan senjata, kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan, kontrol kelahiran dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Hubungan ini adalah alasan mengapa gerakan perempuan dapat mempengaruhi pengaturan internal pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri Kanada. Diantaranya yakni melalui *Department Women and Gender Equality Canada (WAGE)*, *Federated Women's Institutes of Canada*, *Canadian Women's Foundation* dan *The National Council of Women of Canada (NCWC)*. Institusi tersebut mengurus mengenai perempuan dimana mereka memiliki perwakilannya di institusi negara seperti di *House of Commons* untuk menyampaikan aspirasi hak-hak perempuan. Pengaruh pengaturan internal berasal dari politik domestik dan opini publik. Dimana nilai yang dimiliki oleh masyarakat Kanada yakni adanya kesetaraan, rasa hormat, keamanan, kedamaian, dan kesopanan. *Komitmen utama Rencana Federal adalah untuk "menerapkan analisis berbasis gender di seluruh departemen dan lembaga federal"*. (Government of Canada, 2017)

Proses pengambilan keputusan adalah keputusan Kanada untuk memasukkan aspek gender pada bantuan di bidang ekonomi yakni perdagangan dan investasi ke Indonesia. Pemerintah Kanada menjadi pengambil keputusan selama proses memasukkan aspek gender pada bantuan tersebut. Melihat realitas dilapangan mengenai hambatan yang dirasakan oleh wirausaha UKM pelaku kaum perempuan yakni keterbatasannya akses yang dimiliki, Kanada menyediakan program untuk Indonesia yang berfokus pada perdagangan dan investasi melalui input aspek gender dengan melakukan pemberdayaan perempuan. *Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA)* sebagai tindakan pemerintah Kanada dalam komitmennya untuk memiliki aspek gender dalam mempermudah dan membantu perempuan dalam akses perdagangan dan investasi kedua negara.

Pengaturan eksternal pengambilan keputusan adalah kondisi di luar Kanada, yang berdasarkan pada topik tesis ini, adalah masalah gender di Indonesia. Berdasarkan perbedaan peran, di Indonesia, peran perempuan selalu menjadi ibu rumah tangga sedangkan peran laki-laki adalah pencari nafkah. Meskipun dalam kerangka hukum Indonesia bersifat netral gender, namun apabila hambatan yang dirasakan oleh perempuan dianalisis menggugurkan basis gender maka akan terlihat jika perempuan mengalami adanya diskriminasi. Di Indonesia, wirausaha perempuan memiliki peran ganda yakni mengurus pekerjaan rumah tangga dan usaha yang dimiliki. Saat ini masih dijumpai bahwa perempuan sering dikeluarkan dari program pembangunan, sedangkan populasi di Indonesia didominasi oleh perempuan. Jika perempuan pengusaha ini diberdayakan dengan baik dengan memberikan akses informasi dan pengetahuan

mengenai pasar akan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Apabila perempuan tidak dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka karena mereka harus bergantung pada suami mereka maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kemunduran. Jika situasi ini terus terjadi, beberapa perempuan di Indonesia akan menghadapi masalah dalam usahanya yang dapat mengakibatkan kebangkrutan.

Terkait dengan masalah ini, konsep kesetaraan gender mengidentifikasi bahwa setiap manusia baik perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam proses mengembangkan diri baik perempuan atau laki-laki tanpa batasan beban oleh stereotip, peran gender dan prasangka. Jika dikaitkan dengan kondisi perempuan di Indonesia tampaknya masih jauh untuk memenuhi definisi kesetaraan gender karena perempuan seringkali menghadapi hambatan yang ada di masyarakat. Maka dari itu perlunya memasukkan aspek gender disetiap program pembangunan suatu negara.

3. Konsep Rejim Internasional

Selama lebih dari dua puluh tahun rezim internasional atau 'set [...] prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan di mana harapan para pelaku bertemu di suatu bidang hubungan internasional' (Krasner, 1983) telah menjadi agenda Hubungan Internasional. Rejim-rejim internasional adalah tipe utama dari lembaga internasional. (Robert O. Keohane, 1989) Rejim-rejim secara sengaja dibangun, pemerintah-pemerintah internasional parsial pada skala regional atau global, yang dimaksudkan untuk menghilangkan isu-isu spesifik bidang-bidang politik antar nasional dari ranah perilaku swadaya . Dengan menciptakan harapan bersama tentang perilaku yang sesuai dan

dengan meningkatkan tingkat transparansi di bidang isu, rezim membantu negara (dan aktor-aktor lain) untuk bekerja sama dengan maksud untuk meraup keuntungan bersama dalam bentuk kesejahteraan atau keamanan tambahan.

Ketika gender menjadi perhatian global, hal tersebut mendorong terciptanya beberapa organisasi internasional seperti PBB untuk menangani masalah gender. Terkait dengan situasi ini, PBB mengadakan Konferensi Dunia untuk perempuan sejak 1975-1985 yang disebut sebagai *UN Decade for Women* (PBB). Ini adalah konferensi tentang strategi dan rencana untuk mengurangi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, memberdayakan perempuan dalam program pembangunan. Namun, selama *UN Decade for Women*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) telah dibentuk. Dalam keputusan Kanada memberikan bantuan kepada Indonesia melalui *Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance* dipengaruhi oleh rejim internasional yang mengusung tentang pengarusutamaan gender. Kanada merupakan negara yang ikut meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Kanada menandatangani CEDAW pada 17 Juli 1980, dan meratifikasinya pada 10 Desember 1981. (Government of Canada, 2017)

Dalam menyebarkan atau menunjukkan komitmen Kanada dalam kesetaraan gender, pemerintah Kanada mengadopsi Federal Plan for Gender Equality in 1995 sebagai tanggapan terhadap Beijing Platform for Action yang dibuat pada Fourth World Conference on Women (1995). Selain itu dengan adanya agenda 2030 yang

diluncurkan oleh PBB mengenai *Sustainable Development Goals*(SDG) mendorong Kanada untuk membuktikan diri mengenai komitmen terhadap adanya kesetaraan gender. Pemerintah Kanada menganut universalitas Agenda 2030 dan berkomitmen untuk mendukung implementasi SDG di Kanada dan internasional. Bekerja dengan para mitranya, Kanada berupaya untuk mengakhiri kemiskinan dan ketidakesetaraan, membangun masyarakat yang lebih makmur dan damai dan melindungi planet ini. “*Gender Equality*” SDG 5 bertujuan untuk memastikan diakhirinya diskriminasi perempuan dan anak perempuan di mana-mana. Sembilan target tujuan mengacu pada serangkaian tantangan, seperti diskriminasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, hak kepemilikan, dan untuk meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Namun, tantangannya tidak hanya untuk memastikan persamaan hak, tetapi juga untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dalam diskusi tentang pembangunan berkelanjutan. Di sinilah, bisnis memiliki peran kunci dalam memajukan kesetaraan gender. (Global Compact Network Canada)

4. Konsep *Gender Mainstreaming*

Gender merupakan suatu hal yang merujuk pada kontribusi sosial mengenai peran, perilaku aktivitas dan atribut-atribut yang dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan. Gender juga memuat hal-hal mengenai harapan masyarakat akan nilai apa yang dianggap baik dan buruk serta harapan akan peran yang dapat dimainkan oleh perempuan dan laki-laki di masyarakat. Relasi gender, pembagian kerja antara perempuan dan

laki-laki, juga ditentukan oleh sistem produksi. Pada mulanya, baik perempuan dan laki-laki sama-sama melakukan pekerjaan di dalam rumah. Namun seiring berkembangnya waktu terjadi sebuah perubahan di masyarakat dimana laki-laki yang mencari uang dipisah dari unit produksi rumah tangga. Hal ini kemudian mendorong laki-laki untuk keluar rumah, sedang perempuan tetap dirumah. (Azizah, 2017) Tren utama pengarusutamaan gender dipahami oleh para pembuat kebijakan bahwa itu adalah pendekatan yang berusaha untuk melembagakan kesetaraan dengan menanamkan praktik dan norma yang peka gender dalam struktur, proses, dan lingkungan kebijakan publik. (Hidayatulloh & Hutami, 2019)

Gender Mainstreaming (Pengarusutamaan Gender) adalah strategi yang diterima secara global untuk mempromosikan kesetaraan gender. Pengarusutamaan bukanlah tujuan itu sendiri tetapi strategi, pendekatan, sarana untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Pengarusutamaan melibatkan memastikan bahwa perspektif dan perhatian gender terhadap tujuan kesetaraan gender adalah penting untuk semua kegiatan - pengembangan kebijakan, penelitian, advokasi / dialog, perundang-undangan, alokasi sumber daya, dan perencanaan, implementasi dan pemantauan program dan proyek. (United Nations). Dalam pandangan Kanada sendiri dalam memandang pengarusutamaan gender yakni strategi untuk menilai implikasi bagi laki-laki dan perempuan, dari setiap tindakan, kebijakan atau program yang direncanakan di semua bidang dan di semua tingkatan. Pendekatan ini mengakui perlunya memperhitungkan perbedaan sosial dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diusulkan telah

menghasilkan hasil yang adil bagi perempuan dan laki-laki.(Government of Canada, 2017)

Dalam proyek yang dilakukan oleh Kanada dan Indonesia dalam Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance yakni untuk keputusan dalam kebijakan dan program ekonomi dan sosial yang mempengaruhi dan memberikan dampak berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Pengalaman menunjukkan kebijakan dan program paling efektif ketika dampak pada gender dipertimbangkan dan ditangani. Sebagai contoh, pengarusutamaan perspektif gender dalam proyek sebelumnya menunjukkan hasil yang lebih efektif dan tahan lama jika analisis gender berlangsung sejak awal seperti yang tercantum dalam latar belakang penelitian ini. Strategi yang dilakukan oleh Kanada dalam pengarusutamaan gender dalam bantuan ini yakni melalui program pemberdayaan perempuan. Program-program yang dijalankan seperti melakukan pelatihan kepada wirausaha perempuan agar memiliki pengetahuan yang lebih mengenai peluang investasi dan perdagangan.

D. Hipotesis

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang diuraikan, Kanada memasukkan aspek gender dalam *Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance* karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal:

1. Faktor internal yaitu tingginya pengaruh feminisme dalam lembaga non-pemerintah, lembaga pemerintah dan masyarakat Kanada yang dipengaruhi oleh ide-ide feminisme.

2. Faktor eksternal adalah ketimpangan gender di Indonesia masih tinggi dan adanya rejim internasional yang diikuti oleh Kanada dan Indonesia

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bantuan kerjasama ekonomi Kanada dan implementasi ke Indonesia.
2. Untuk memahami perhatian dan komitmen Kanada tentang masalah gender.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan dibalik Kanada memasukkan aspek gender dalam proyek *Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance*.
4. Untuk mengetahui evaluasi dari implementasi *Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance* yang dilakukan antara Kanada dan Indonesia sehingga dapat mengetahui sejauh mana efektifitas kerjasama tersebut dan selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan solusi-solusi yang lebih baik atas permasalahan yang terjadi terutama terhadap adanya kesetaraan gender.

F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (deskripsi) mengenai proses keputusan suatu negara dalam membentuk kerjasama bantuan dengan studi kasus tentang proyek bantuan antara Kanada-Indonesia dalam *Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance*.

Teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Penelitian ini didasarkan pada literatur akademik, laporan resmi pemerintah, jurnal, laporan berita yang kredibel, artikel, dan data elektronik lainnya yang relevan.

Teknik pengolahan data dimulai dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan proyek *Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance*. Kemudian mencari data mengenai perjalanan komitmen Kanada terhadap penyebaran nilai dan norma pengarusutamaan gender dalam kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya, dimulai dari mana komitmen tersebut terbentuk. Mengumpulkan sumber data yang menunjukkan hubungan ekonomi terutama dalam bidang perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh Kanada dan Indonesia. Setelah semua data terkumpul, disusun berdasarkan kronologi waktu sehingga dapat menghasilkan sebuah proses perjalanan hubungan bantuan kerjasama antara Indonesia dan Kanada.

Teknik analisis data penelitian ini yakni menghubungkan-hubungkan dengan sumber lain yang lebih dekat dengan objek. Mencari sumber yang memiliki banyak referensi sehingga fakta yang akan dihasilkan lebih terpercaya dan dengan memastikan apakah data yang dimasukkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Teknik ini secara umum berguna untuk mengurangi tingkat kesalahan input data dalam penelitian ini. Selain itu juga menggunakan teknik reduksi data dengan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah teknik induktif dimana proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada bukti fakta yang ada. Proses pembentukan hipotesis dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diobservasi dan dikumpulkan terlebih dahulu dengan kesimpulan menjelaskan fakta sedangkan faktanya mendukung kesimpulan.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian digunakan untuk membatasi agar penelitian tidak terlalu luas. Dalam tesis yang berjudul “Alasan Kanada Memasukkan Aspek Gender Dalam *Canada-Indonesia Trade And Private Sector Assintance 2014-2019*” mengambil jangkauan penelitian dengan kurun waktu yakni muai 2014 hingga 2019 dengan berfokus pada masa pemerintahan Canada dibawah Perdana Menteri Justin Trudeau.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini akan menggunakan sistem penulisan itu terdiri dari lima bab untuk menjelaskan hasil penelitian skripsi, yaitu:

BAB I adalah bab awal yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah bab yang akan membahas tentang sejarah bantuan pembangunan Kanada dan pelaksanaan bantuan pembangunan ekonomi Kanada terhadap Indonesia

BAB III adalah bab yang akan membahas tentang komitmen Kanada tentang masalah gender,

perkembangan program bantuan tentang masalah gender ke Indonesia dan tanggapan Indonesia terhadap bantuan tersebut

BAB IV adalah bab yang akan membahas tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kebijakan luar negeri Kanada untuk melibatkan aspek gender dalam bantuan *Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance*.

BAB V adalah bab tentang kesimpulan dari penjelasan dalam bab-bab sebelumnya dan kesimpulan yang ditarik diharapkan dapat menjawab penelitian pertanyaan.